



**WALIKOTA TOMOHON  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA TOMOHON**

**NOMOR 060/Bag.Hukum/SK/III/162-2021**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN 2021**

**WALIKOTA TOMOHON,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Tomohon tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2018 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2020 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN 2021.**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada **Diktum KESATU** mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2016-2021

dan juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- a. Indikator Kinerja Utama pada tingkat Kota sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.
- b. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II/Satuan Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

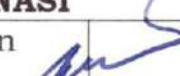

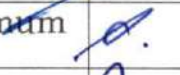

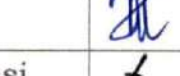
KETIGA : Indikator Kinerja Utama ini dibuat untuk digunakan sebagai dasar Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di Tomohon  
pada Tanggal 3 Maret 2021

**WALIKOTA TOMOHON,**

  
**CAROLL J. A. SENDUK, SH**

PARAF KOORDINASI	
Wakil Walikota Tomohon	
Pj.Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Inspektur Kota Tomohon	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bagian Organisasi	

dan juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- a. Indikator Kinerja Utama pada tingkat Kota sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.
- b. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II/Satuan Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

KETIGA : Indikator Kinerja Utama ini dibuat untuk digunakan sebagai dasar Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan *W*

Ditetapkan di Tomohon  
pada Tanggal 3 Maret 2021

**WALIKOTA TOMOHON,**  
*Caroll J. A. Senduk*  
**CAROLL J. A. SENDUK, SH**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA TOMOHON**  
**NOMOR 060/Bag.Hukum/SK/III/162-2021**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN 2021.**

**Visi : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA TOMOHON YANG RELIGIUS, BERDAYA SAING, DEMOKRATIS, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, MENUJU KOTA WISATA DUNIA "**

**Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Berkualitas dan Beretika Melalui Pendidikan Yang Unggul**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
Meningkatkan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial serta sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan berkompeten dengan menjunjung tinggi profesionalitas layanan	Terjadinya peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal	1	Angka rata-rata lama sekolah	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Tahun } n \text{ dengan lama Pendidikan yang ditamatkan}}{\text{Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas yang sedang sekolah atau/dan telah berijazah}} \times 100$	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
		2	Harapan Lama Sekolah	$\frac{\text{Harapan Lama Sekolah} - \text{HLS minimum}}{\text{Harapan Lama Sekolah maksimal} - \text{HLS minimum}} \times 100$ <p>Cat. Minimum 0, maksimal 18</p>	
		3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%): PAUD SD/MI/SDLB SMP/MTS/SMPBL	$\frac{\text{Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV: PAUD, SD/MI/SDLB}}{\text{Jumlah PAUD, SD/MI/SDLB di wilayah Kota Tomohon}} \times 100$	

		4	Tingkat partisipasi pendidikan non formal	Jumlah Partisipasi pendidikan non formal $\frac{\text{Jumlah Partisipasi pendidikan non formal}}{\text{Jumlah pendidikan non formal yang ada}} \times 100$	
Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau		1	Angka usia harapan hidup	Jumlah semua umur orang yang meninggal $\frac{\text{Jumlah semua umur orang yang meninggal}}{\text{Jumlah orang yang meninggal}} \times 100$	DINAS KESEHATAN DAERAH
		2	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 yang dirujuk $\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 yang dirujuk}}{\text{Jumlah seluruh masyarakat miskin di Kota Tomohon}} \times 100$	
		3	Persentase cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti program jaminan kesehatan $\frac{\text{Jumlah masyarakat yang mengikuti program jaminan kesehatan}}{\text{Jumlah seluruh masyarakat di Kota Tomohon}} \times 100$	
		4	Cakupan ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas	Jumlah penyediaan, obat, vaksin dan alat kesehatan $\frac{\text{Jumlah penyediaan, obat, vaksin dan alat kesehatan}}{\text{Jumlah Puskesmas}} \times 100$	
		5	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan $\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan}}{\text{Jumlah seluruh masyarakat miskin di Kota Tomohon}} \times 100$	

Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga sejahtera	1	Cakupan/Pervelensi peserta KB aktif	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100$	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAERAH
	2	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi	$\frac{\text{Jumlah pengeluaran alat kontrasepsi}}{\text{Jumlah persediaan alat kontrasepsi}} \times 100$	
	3	Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	$\frac{\text{Peserta aktif Keluarga PS + KS 1}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100$	
Meningkatnya kemampuan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terlayani}}{\text{Jumlah seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial}} \times 100$	DINAS SOSIAL DAERAH
	2	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan dan pendampingan sosial	$\frac{\text{Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan dan pendampingan sosial}}{\text{Jumlah seluruh keluarga miskin}} \times 100$	
Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dalam rangka meningkatnya gemar dan budaya baca masyarakat	1	Jumlah pengunjung perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah kunjungan perpustakaan selama 1 tahun}}{\text{Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani}} \times 100$	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	Pembangunan perpustakaan daerah	Jumlah Perpustakaan	
	3	Persentase perpustakaan kelurahan	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan yang terbangun}}{\text{Jumlah kelurahan}} \times 100$	
Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olah raga	1	Jumlah Klub / organisasi Olahraga yang aktif dan mandiri	$\frac{\text{Jumlah organisasi olahraga yang aktif dan mandiri}}{\text{Jumlah organisasi}} \times 100$	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH

		2	Jumlah Organisasi kepemudaan yang aktif dan mandiri	$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100$	
		3	Tersedianya sport center	Sport Center yang terbangun	
		4	Terbangunnya lapangan olahraga yang representatif di 5 kecamatan	Lapangan olahraga yang representatif di 5 kecamatan yang terbangun	

### Misi 2 : Mewujudkan Daerah Yang Berdaya Saing dan Mandiri

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
Mengembangkan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah yang pro-job, pro-poor dan pro environment	Meningkatnya kemandirian Usaha mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah juga Pengembangan sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1	Cakupan Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah total koperasi yang ada}} \times 100$	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH
		2	Persentase penumbuhan Jumlah Wirausaha baru	$\frac{\text{Jumlah Wirausaha baru}}{\text{Jumlah Wirausaha yang ada}} \times 100$	
	Meningkatnya daya saing dan nilai tambah dengan inovasi usaha pertanian perkebunan, peternakan, dan perikanan	1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	$\frac{\text{Jumlah produksi sekarang per hektar}}{\text{jumlah produksi per hektar sebelumnya}} \times 100$	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH

		2	Produktivitas Florikultura lokal lainnya per hektar	$\frac{\text{Produksi Horikultura}}{\text{Luas Panen (Hektar)}} \times 100$	
		3	Peningkatan produksi peternakan utama (sapi, babi, ayam)	$\frac{\text{Jumlah Produksi Peternakan Utama tahun terakhir}}{\text{Jumlah Produksi peternakan tahun sebelumnya}} \times 100$	
		4	Nilai tukar petani	$\frac{\text{Indeks Harga yang diterima petani}}{\text{Indeks harga yang di bayar petani}} \times 100$	
Meningkatkan dan pengembangan daya saing industri kecil dan menengah	1	Cakupan bina kelompok pengrajin	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Binaan Pengrajin}}{\text{Jumlah Pengrajin}} \times 100$	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	
	2	Persentase tingkat pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	$\frac{\text{Jumlah IKM tahun n} - \text{jumlah IKM formal n-1}}{\text{Jumlah IKM sampai dengan tahun n}} \times 100$		
	3	Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana pasar}}{\text{Jumlah Pedagang}} \times 100$		
Pemantapan ketahanan pangan daerah berlandaskan kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok berbasis pangan lokal	1	Penurunan persentase barang beredar ilegal dan tidak layak konsumsi	$\frac{\text{Jumlah barang beredar ilegal dan tidak layak konsumsi}}{\text{Jumlah barang beredar legal dan layak konsumsi}} \times 100$		

		2	Penguatan cadangan pangan ekuivalen beras	$\frac{n + (n1+n2+n3+n4)}{\text{Target Renstra}} \times 100 \%$ <p>n = Cadangan pangan Pemerintah Renstra Sebelumnya  n1= Cadangan pangan Pemerintah Tahun Renstra Berjalan  n2= Cadangan pangan Pemerintah Tahun Renstra Kedua  n3= Cadangan pangan Pemerintah Tahun Renstra Ketiga  n4= Cadangan pangan Pemerintah Tahun Renstra Keempat</p>	DINAS PANGAN DAERAH
		3	Stabilitas harga dan pasokan pangan CV (Koefisien) <10%	$\frac{\text{Koefisien keragaman produksi untuk harga dan pasokan komoditas kecil}}{\text{Koefisien keragaman target untuk harga dan pasokan komoditas kecil}} \times 100$	
		1	Peningkatan Realisasi Investasi (Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri)	$\frac{\text{Realisasi investasi (PMDN/PMA) tahun n} - \text{realisasi investasi tahun n-1}}{\text{Realisasi investasi tahun n-1}} \times 100$	
	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	2	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat}} \times 100$	KECAMATAN
		3	Persentase kelurahan yang menyusun data potensi kelurahan yang valid	$\frac{\text{Jumlah kelurahan yang menyusun data potensi kelurahan yang valid}}{\text{Jumlah kelurahan}} \times 100$	

Mewujudkan sarana dan prasarana / infrastruktur perkotaan yang memadai dalam rangka menunjang perekonomian masyarakat	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat serta Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$	DINAS TENAGA KERJA DAERAH
		2	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100$	
		3	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar}} \times 100$	
	Meningkatkan kehandalan sarana dan prasarana pelayanan publik (jalan dan jembatan; air minum, air limbah, drainase, lingkungan pemukiman; kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak; jaringan irigasi, dan pelayanan persampahan	1	Persentase Jalan Kota dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Panjang jalan dalam Kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100$	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
		2	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yg terlayani tangki septik /MCK}}{\text{Jumlah seluruh penduduk}} \times 100$	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAERAH
		3	Rumah tangga pengguna air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100$	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan	1	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek dalam kota	$\frac{\text{Jumlah penindakan kendaraan angkutan umum}}{\text{Total kendaraan angkutan umum yang ada}} \times 100$	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

**Misi 3 : Mewujudkan Kota Tomohon Yang Demokratis Berdasarkan Hukum**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
Mewujudkan pemerintahan dan kemasyarakatan yang mampu berjalan pada aturan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku	Meningkatnya kesadaran politik dan hukum	1	Persentase ormas terdaftar aktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah ormas yang terdaftar}}{\text{Jumlah ormas di Kota Tomohon}} \times 100$	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
		2	Tingkat partisipasi dalam pemilu	$\frac{\text{Jumlah Pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu}}{\text{Jumlah Pemilih Kota Tomohon}} \times 100$	
	Meningkatnya perencanaan pengelolaan pembangunan daerah yang transparan dan partisipatif	1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan perda/perwako}} \times 100$	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		2	Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu}}{\text{Jumlah realisasi pelaksanaan dari dokumen perencanaan pembangunan}} \times 100$	
		3	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan provinsi dan pusat	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan yang selaras dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan pembangunan RPJMD dan RKPD Kota}} \times 100$	

		4	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal}}{\text{Jumlah Rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal}} \times 100$	INSPEKTORAT
		5	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		6	Jumlah asset pemkot yang tersertifikasi	Jumlah asset pemkot yang tersertifikasi $\frac{\text{Jumlah asset pemkot yang tersertifikasi}}{\text{Jumlah keseluruhan aset Pemerintah Kota Tomohon}} \times 100$	
		7	Nilai evaluasi LKIP Kota Tomohon	Kategori Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH
		8	Persentase perangkat daerah yang naskah dokumennya tersimpan dengan baik	Jumlah Perangkat Daerah yang naskah dokumennya tersimpan dengan baik $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang naskah dokumennya tersimpan dengan baik}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
		9	Rasio penduduk berKTP elektronik per satuan penduduk	Jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik $\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP (>17 atau pernah/sudah menikah)}} \times 100$	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, ASN yang dikenai hukuman disiplin, sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi, ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan, ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, ASN yang dikenai hukuman disiplin, sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi, ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan, ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat daerah <hr style="width: 10%; margin: 0 auto;"/> x 100 Jumlah yang dibutuhkan	SEKRETARIAT DPRD, BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH, BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH, BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	2	Persentase ASN yang terlatih dan berkompeten	Jumlah ASN Yang Terlatih Dan Berkompeten <hr style="width: 10%; margin: 0 auto;"/> x 100 Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

**Misi 4 : Mewujudkan Kota Tomohon Yang Aman, Damai dan Bersatu Dalam Keberagaman**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>FORMULA PERHITUNGAN</b>	<b>PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB</b>
Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di masyarakat	Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan	1 Petugas perlindungan Masyarakat (Linmas)	Jumlah linmas <hr style="width: 10%; margin: 0 auto;"/> x 100 Jumlah penduduk	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH

masyarakat serta memberdayakan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Di Kota Tomohon	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian K3}}{\text{Jumlah pelanggaran K3}} \times 100$	
	3	Cakupan patrol petugas Polisi Pamong Praja (kali sehari)	Jumlah patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 jam (2x sehari)	
	1	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	$\frac{\text{Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (<1 jam setelah pengaduan)}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100$	
Terwujudnya penanggulangan bencana pada tahapan siaga, bencana, tanggap darurat pasca bencana dan penanggulangan bencana kebakaran serta pengendalian dan Operasi Penanggulangan bencana	2	Cakupan pelayanan bencana pada saat siaga bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	$\frac{\text{Jumlah pelayanan bencana pada saat siaga bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana}}{\text{Jumlah bencana}} \times 100$	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	$\frac{\text{Jumlah pelayanan bencana kebakaran kota}}{\text{Jumlah bencana}} \times 100$	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH
	4	Persentase siaga bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi bencana	$\frac{\text{Jumlah siaga bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi bencana}}{\text{Jumlah bencana}} \times 100$	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	Jumlah organisasi kerukunan beragama/organisasi keagamaan yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah organisasi keagamaan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah organisasi beragama}} \times 100$	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya kualitas kerukunan antar umat beragama, pengembangan wawasan kebangsaan	1	Jumlah organisasi kerukunan beragama/organisasi keagamaan yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah organisasi keagamaan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah organisasi beragama}} \times 100$	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	serta kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	2	Jumlah demo yang bersifat sara	$\frac{\text{Jumlah demo bersifat sara}}{\text{Jumlah demo}} \times 100$	
		3	Persentase terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam beribadah dan kepemilikan tempat beribadah sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah golongan agama}}{\text{Jumlah tempat beribadah}} \times 100$	
		4	Cakupan pembinaan, pengembangan wawasan kebangsaan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	$\frac{\text{Jumlah pembinaan, pengembangan wawasan kebangsaan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya}}{\text{Jumlah pengembangan wawasan kebangsaan}} \times 100$	

**Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Berkepribadian Dalam Kebudayaan**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		FORMULA PERHITUNGAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
Mewujudkan penggalan dan pemeliharaan potensi kebudayaan serta peningkatan pengelolaan keragaman budaya lokal	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pengembangan seni budaya lokal, pengembangan Nilai Budaya, pengelolaan Kekayaan Budaya dan pengelolaan keragaman Budaya	1	Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) dalam kondisi baik dan terlindungi	Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) dalam kondisi baik	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
		2	Seni budaya tradisi yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah seni budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah seni budaya yang ada}} \times 100$	

		3	Cakupan gelar seni budaya dan festival	$\frac{\text{Jumlah gelar seni budaya dan festival}}{\text{Jumlah seni budaya yang ada}} \times 100$	
		4	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	$\frac{\text{Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya}}{\text{Jumlah sarana yang ada}} \times 100$	

**Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		FORMULA	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan	Terwujudnya ruang Kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	1	10% RTH di lokasi pemukiman, industri, pusat perdagangan dan lokasi padat lalu lintas (100%)	$\frac{\text{Jumlah usaha yang memenuhi 10\%RTH}}{\text{Jumlah seluruh usaha}} \times 100$	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
		2	Persentase Penegakan Hukum Lingkungan	$\frac{\text{Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemerintah daerah}}{\text{Jumlah kasus Lingkungan}} \times 100$	
		3	Persentase jumlah lokasi pemantauan air yang status mutu airnya memenuhi baku mutu	$\frac{\text{Jumlah titik sampling air yang memenuhi baku mutu}}{\text{Jumlah titik sampling air}} \times 100$	




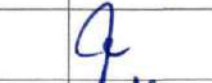
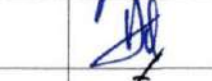

		4	Jumlah laporan masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindak lanjuti (100%)	$\frac{\text{Jumlah laporan masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindak lanjuti (100\%)}}{\text{Jumlah laporan masyarakat}} \times 100$	
		5	Persentase penanganan sampah	$\frac{\text{Jumlah volume sampah yang terangkut}}{\text{Jumlah volume sampah}} \times 100$	
		6	Peningkatan Luasan Ruang terbuka Hijau melalui pengembangan taman kota dan jalur hijau, persentasi luasan ruang terbuka hijau yang terpelihara	$\frac{\text{Jumlah seluruh lokasi RTH yang dibangun}}{\text{Jumlah Lokasi RTH}} \times 100$	

**Misi 7 : Mengembangkan dan Memantapkan Destinasi, Pemasaran Industri dan Kelembagaan Kepariwisata Daerah Sebagai Landasan Pembangunan Pariwisata Kota Tomohon**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>		<b>FORMULA</b>	<b>PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB</b>
Mengembangkan dan mengelola serta menyusun destinasi wisata, peningkatan daya saing usaha pariwisata dan meningkatkan kebijakan destinasi pariwisata berkelas dunia serta meningkatkan perjalanan wisatawan	Terwujudnya kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata yang didukung sarana dan prasarana pariwisata yang aman dan nyaman dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan	1	Jumlah obyek wisata unggulan	$\frac{\text{Jumlah obyek wisata unggulan}}{\text{Jumlah obyek wisata}} \times 100$	DINAS PARIWISATA DAERAH
		2	Kunjungan wisata	$\frac{\text{Jumlah realisasi kunjungan wisatawan di Kota Tomohon}}{\text{Jumlah target kunjungan wisatawan di kota Tomohon}} \times 100$	

		3	Lama tinggal wisatawan	Rata-rata lama tinggal wisatawan per hari	
		4	Jumlah Kelompok Binaan	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan}}{\text{Jumlah kelompok yang terdaftar}} \times 100$	

**PARAF KOORDINASI**

Wakil Walikota Tomohon	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Inspektur Kota Tomohon	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bagian Organisasi	

Ditetapkan di Tomohon  
pada Tanggal 3 Maret 2021

**WALIKOTA TOMOHON,**



**CAROLL J. A. SENDUK, SH**

		3	Lama tinggal wisatawan	Rata-rata lama tinggal wisatawan per hari	
		4	Jumlah Kelompok Binaan	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan}}{\text{Jumlah kelompok yang terdaftar}} \times 100$	

Ditetapkan di Tomohon  
pada Tanggal 3 Maret 2021


  
**WALIKOTA TOMOHON,**  
  
**CAROLL J. A. SENDUK, SH**